

PENGANTAR REDAKSI

Dalam edisi ini, *Populasi* kembali hadir dengan mengetengahkan beberapa artikel menarik tentang lemahnya posisi masyarakat, terutama masyarakat miskin, terhadap negara maupun institusi sosial lainnya. Dalam era otonomi daerah, aparat birokrasi masih menerapkan pola dan sindrom kekuasaan sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kurang maksimal. Hal ini secara panjang lebar diuraikan dalam artikel Bambang Wicaksono. Kelambanan pelayanan di lingkungan birokrasi pemerintah disebabkan oleh dua hal, yakni masih berlakunya kultur feodalistis dan rendahnya kualitas sumber daya birokrat. Birokrasi pemerintah belum sensitif untuk mengembangkan sistem pelayanan yang berbasis pada kepentingan publik secara luas.

Tulisan Nasikun membahas tentang isu-isu strategis yang perlu dipahami dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga pelayanan kesehatan, terutama bagi penduduk miskin. Rendahnya tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan di kalangan penduduk miskin merupakan akibat dikembangkannya ciri-ciri lembaga pelayanan kesehatan modern, seperti organisasi rumah sakit yang bersifat masif dan terlalu kompleks, birokrasi rumah sakit yang bersifat impersonal, meraja, dan sangat menguasai.

Pada tulisan berikutnya, Pande Made Kutaneegara menyoroti kegiatan atau adat kebiasaan sumbang-menyumbang yang muncul sebagai respon terhadap berbagai keterbatasan dan masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat Jawa. Namun dalam perkembangannya, aktivitas sumbang-menyumbang justru menjadi penekan dan menciptakan *social insecurity* di kalangan penduduk miskin. Upaya bertahan hidup bagi masyarakat (terutama di masa krisis) melalui aktivitas migrasi juga dibahas dalam *Populasi* ini oleh Sukamdi dan Setiadi. Artikel tersebut mempertanyakan kembali peran migrasi internasional sebagai salah satu pilihan bagi masyarakat dan sebagai jalan keluar dari situasi krisis di Indonesia.

*Populasi* edisi kali ini diakhiri dengan tulisan Amelia Maika yang membahas persoalan perencanaan pengembangan wilayah. Menurutnya, perkembangan wilayah berjalan lambat karena tidak adanya investasi yang memadai. Oleh karena itu, perlu dilakukan perombakan ide dengan jalan menciptakan *image* baru yang lebih baik untuk menarik dan meningkatkan investasi pada suatu wilayah. Dalam hal ini perlu diciptakan *cultural quarter* yang mengubah suatu kawasan yang tidak memiliki nilai ekonomis menjadi suatu daerah baru yang kaya akan potensi kultural dan ekonomis.